

pelampung, botol bekas ini sangat kuat, elastis, ringan, mudah diperoleh, terjangkau serta dapat digunakan berulang-ulang.

3. Inovasi pada pembenihan tanaman jati lokal dilakukan oleh kelompok perempuan Kabupaten Konawe Selatan. Secara teori, benih yang akan disemai terlebih dahulu ditabur pada bedengan kemudian dibakar, namun cara tersebut memiliki tingkat keberhasilan hanya 40% untuk tumbuh. Praktik pembenihan yang dilakukan oleh kelompok perempuan Kabupaten Konawe Selatan adalah melalui pemberian perlakuan terhadap benih sebelum disemai. Benih terlebih dahulu dimasukkan ke dalam karung yang berongga dan mudah menyerap air. Kemudian benih di dalam karung direndam ke dalam pembuangan penampungan air atau ke dalam air berlumpur selama tiga hari tiga malam. Setelah tiga hari benih tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama satu hari. Keesokan harinya benih ditaburkan ke bedeng yang telah disiapkan.

Teknik lain yang juga biasa dilakukan yakni perendaman benih dengan air panas selama minimal tiga hari tiga malam, di mana setiap pagi benih tersebut dijemur di bawah sinar matahari dan di sore hari dilakukan lagi perendaman sampai esok hari untuk penjemuran. Proses dilakukan selama tiga berturut-turut. Metode bertujuan untuk memudahkan pertumbuhan kecambah pada benih jati tersebut. Cara ini memiliki 85% tingkat keberhasilan tumbuh.

Praktik persemaian yang dilakukan oleh para kelompok perempuan petani jati sudah dilakukan selama kurang lebih 4 tahun. Di tahun ketiga, kegiatan persemaian jati kelompok perempuan sudah mempunyai kebun benih sendiri dengan

usia bibit jati yang dimiliki kelompok perempuan di kebun benih sudah berumur kurang lebih 3 tahun dan tinggi pohon bibit Jati tersebut sudah mencapai sekitar 6 meter.

Kebun benih milik kelompok ini adalah sebanyak 4 buah yang tersebar di 2 kecamatan dan 2 desa, yakni Kecamatan Laynea yang terdiri dari Desa Aoreo dan Desa Pamandati, serta Kecamatan Laeya yang terdiri dari Desa Lambakara dan Desa Ambalodangge di Kabupaten Konawe Selatan. Perlakuan pada benih yang akan disemai ini adalah cara mudah dan murah sehingga dapat direplikasikan di daerah lain. (*)

*Penulis adalah staf Aliansi Perempuan (ALPEN) Sultra yang berfokus pada jender, pemberdayaan masyarakat, masyarakat pesisir dan ekonomi lokal, khususnya produksi rumput laut. Kontak: Jl. Malik III No. 127, Kendari, email: alpen.sultra@gmail.com, 081341517413

Memanfaatkan Pemetaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kampung

Oleh Bertha Ronsumbre

Meos Mangguandi adalah salah satu pulau di gugusan pulau-pulau Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Daerah ini mempunyai potensi sumber daya alam darat dan laut yang cukup berlimpah, seperti kelapa, kayu besi, bintanggor, matoa dan bermacam-macam jenis anggrek.

Selain itu Meos Mangguandi merupakan daerah potensial untuk perikanan tangkap karena memiliki hamparan terumbu karang dan laguna yang luas. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Yayasan Terangi bersama Yayasan KEHATI Jakarta, Yayasan Rumsram dan LIPI-Biak pada tahun 2000, dikatakan tutupan terumbu karang kawasan ini sebesar 43,21% dengan jenis dan koloni karang yang cukup beragam dan bervariasi, seperti *Tabulate*, *Acropora*, *Goniopora spp* dan *Porites nigrescens*. Berkat keragaman terumbu karang ini,



setidaknya terdapat 88 jenis ikan di perairan Meos Mangguandi, yang sangat variatif dibandingkan kawasan lainnya di Kepulauan Padaido.

Kekayaan laut ini menjadikan Meos Mangguandi sebagai daerah tangkapan bersama bagi masyarakat di sekitar Kepulauan Padaido Atas, Kepulauan Padaido Bawah dan Pulau Biak serta nelayan-nelayan dari luar Papua. Akibatnya, eksploitasi dengan menggunakan bahan peledak dan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan juga sering dilakukan oleh masyarakat nelayan dari luar Pulau Meos Mangguandi, termasuk nelayan dari Biak Kota dan pulau tetangga lainnya. Mereka menggunakan bom sianida dan alat tangkap yang merusak lingkungan.

Berangkat dari kondisi di atas, maka pada tahun 2000 masyarakat memulai kegiatan konservasi dan melarang

penangkapan ilegal yang dilakukan oleh orang luar, di wilayah adat masyarakat pulau ini. Perjuangan untuk melindungi hak masyarakat atas sumber daya alam laut, awalnya hanya dilakukan oleh pemimpin masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan Gereja, melalui teguran kepada pihak atau oknum yang melanggar. Sayangnya, hal ini tidak menyelesaikan masalah. Nelayan dari luar tetap datang untuk menangkap dengan alat-alat yang merusak lingkungan laut. Penyebabnya, karena laut masih dianggap sebagai sumber daya bersama yang dapat dimanfaatkan bersama pula.

Kondisi ini kemudian mendorong inisiatif masyarakat Meos Mangguandi untuk melindungi sumber daya laut milik mereka dengan menggunakan peta sebagai alat bantu. Peta dipilih oleh masyarakat setelah melihat kasus yang dialami oleh masyarakat adat Saba Marao di pesisir Timur Pulau Biak pada tahun 1997 yang telah kehilangan 325 hektar tanahnya untuk pembangunan Hotel Marao. Saat itu masyarakat Saba Maro dan Opiaref harus berjuang melawan pemerintah dan investor yang lagi-lagi akan mengambil tanah dan laut mereka untuk perluasan pembangunan Hotel Marao.

Keberhasilan masyarakat Saba Marao dan Opiaref ini menjadi contoh bagi masyarakat Biak, khususnya masyarakat Padaido Atas dan Padaido Bawah bahwa dengan pemetaan tanah adat maka masyarakat menjadi terorganisir dan dapat bersama-sama mempertahankan tanah dan laut mereka.

Keberhasilan itu juga kemudian mendorong masyarakat adat Meos Mangguandi, untuk membuat peta yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam penyelesaian masalah dan memperkuat posisi tawar-menawar dengan pihak luar guna memperoleh pengakuan atas haknya, juga sebagai alat pengorganisasian masyarakat.

Proses dan Hasil Pemetaan

Masyarakat adat di Meos Mangguandi mulai melakukan kegiatan pemetaan pada tahun 2000. Proses yang dilakukan oleh SekPro PLKL Biak dan LMMA-Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penjajakan keinginan masyarakat untuk melakukan pemetaan partisipatif serta tujuannya;
2. Penggalan informasi tentang potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam penggalan informasi, aspek yang dilihat antara lain;
 - a. Sejarah asal usul masyarakat dan kepemilikan kampung/pulau serta bagaimana pengakuan di antara marga/*kekerabatan* antara satu terhadap yang lain dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
 - b. Potensi sumber daya alam yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi;
 - c. Jenis-jenis peta tematik apa yang dibutuhkan.
3. Sosialisasi manfaat pembuatan peta partisipatif dengan cerita kasus yang dialami oleh masyarakat di tempat lain;
4. Pelatihan teknis pemetaan partisipatif;

Dari kegiatan selama 4 tahun, 9 peta berdasarkan tema yang telah dihasilkan oleh masyarakat, yaitu:

1. Peta Jenis Tanah
2. Peta Penggunaan Tanah
3. Peta Pemukiman
4. Peta Batas Wilayah Tangkapan Tradisional
5. Peta Sebaran Potensi dan Habitat Laut
6. Peta Abrasi
7. Peta Daerah Lindung Laut
8. Peta Pemukiman
9. Peta Presentasi Terumbu Karang Hidup, tahun 2005.

Setelah pembuatan peta selesai, masyarakat Pulau Meos Mangguandi sepakat untuk menyusun Aturan Adat dan menyusun Statuta Lembaga Adat. Masyarakat sadar, kehadiran peta yang tidak didukung dengan aturan yang menjelaskan cara pemanfaatan sumber daya alam tetap akan membuka celah bagi eksploitasi.

Aturan Adat mengenai Peraturan Sumber Daya Alam (PSDA) dan Statuta Lembaga Adat yang telah disusun, kemudian disahkan menjadi peraturan kampung.

Dengan adanya peta dan aturan PSDA; masyarakat mengetahui dan memahami potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Meos Mangguandi dan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai dampaknya, ada dorongan dan inisiatif dari masyarakat untuk menjaga potensi alam agar tidak habis terkuras.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan kawasan lindung. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi biota laut yang hampir punah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti teripang, ikan kakap, kima dan lain sebagainya. Saat ini di Pulau Meos Mangguandi terdapat 3 lokasi lindung yang dijaga dan dikelola oleh tim konservasi kampung.*

*Penulis adalah staf Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut (Locally Managed Marine Area) Kontak: Jl. Bosnik Raya No. 5 RT.02/II, Biak, plkl_biak@yahoo.com, 081344146950, 0981-26303

“Bank Ikan” untuk Melestarikan Sumber Daya Pesisir

Oleh Ma’ruf Kasim

Sumberdaya pesisir memegang peranan yang sangat vital dalam menopang kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Mengingat perannya ini, maka tentu sangat disayangkan bila dalam pemanfaatannya, terjadi eksploitasi yang mengakibatkan degradasi lingkungan.

Untuk mengatasi degradasi lingkungan, salah satu langkah antisipatif yang hendaknya digalakkan adalah mengoptimalkan peran masyarakat menjaga sendiri lingkungan mereka. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sumberdaya bagi kehidupan mereka dapat dilakukan secara terus menerus dengan berbagai cara dan strategi. Model penyadaran yang terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat adalah pendekatan yang tepat.

Belajar dari pengalaman selama ini, telah banyak program yang disusun dan disalurkan kepada masyarakat pesisir,

namun sayangnya tingkat keberlanjutannya rendah. Realitas menunjukkan, begitu program selesai, maka berakhir pula kepedulian melanjutkan program dan bahkan kepedulian terhadap lingkungan itu sendiri.

Disadari bahwa salah satu program pengelolaan sumberdaya pesisir dengan nama *Marine and Coastal Resources Management Project* (MCRMP) yang ada di hampir seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia, merupakan program yang melahirkan konsep pengelolaan pesisir terpadu. Konsep ini melahirkan 4 buah dokumen pengelolaan yang meliputi dokumen rencana strategis, dokumen rencana zonasi, dokumen rencana pengelolaan dan dokumen rencana aksi. Keempat dokumen ini menyinergikan suatu konsep pengelolaan wilayah pesisir yang komprehensif, terintegrasi, rapi dan terstruktur. Selain itu juga, memang dalam realisasi program di tingkat desa, ada beberapa program seperti pengembangan mata pencaharian alternatif dan pengelolaan sumberdaya alam skala kecil (SNRM). Namun subprogram MCRMP ini sangat singkat dengan model pengelolaan yang sifatnya berbasis proyek sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat pesisir. Sangat disayangkan, dengan berakhirnya program MCRMP pada tahun 2008, maka berakhir pula semua konsep pengelolaan pesisir. Sejumlah dokumen yang dilahirkan hanya terpajang di lemari kantor-kantor Bappeda dan Departemen Kelautan dan Perikanan di provinsi dan kabupaten.

Tentu model pengelolaan semacam ini tidak efektif karena rendahnya kepedulian melanjutkannya. Pihak pemerintah, misalnya, enggan meneruskan dan mengambil alih skenario pengelolaan terpadu ini untuk diaplikasikan dalam konsep pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir. Inisiatif

pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat itu sendiri, juga tidak dapat diharapkan.

Belajar dari MCRMP, disadari bahwa salah satu pendekatan terbaik adalah bagaimana mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kesadaran masyarakat pesisir akan terbangun jika mereka benar-benar melihat manfaat yang nyata program yang dirancang untuk masyarakat.

Pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa sumber daya pesisir tidak akan habisnya, mulai pudar seiring dengan pengalaman bahwa mereka harus mencapai daerah yang cukup jauh hanya untuk mendapatkan sedikit sumberdaya demi memenuhi kebutuhan. Ditambah lagi sudah semakin berkurangnya ikan yang menjadi sasaran penangkapan mereka. Hal ini merupakan pembelajaran yang sangat berarti bagi masyarakat pesisir dan ini pulalah yang dapat memberikan ide pembelajaran program yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Untuk memberikan model pembelajaran yang optimal dan efektif di kalangan masyarakat pesisir memang tidaklah mudah, apalagi bila hanya dilakukan dengan pendekatan yang instan.

“Bank Ikan” Milik Bersama

Salah satu program pelestarian lingkungan yang dapat dijadikan contoh pendekatan yang terstruktur dan berbasis pada peningkatan partisipasi masyarakat adalah program penetapan daerah perlindungan laut di 43 desa yang difasilitasi oleh Coremap II Kabupaten Buton khususnya dan umumnya seluruh desa di wilayah Coremap II Kawasan Timur Indonesia yang didukung Bank Dunia.



Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai kawasan konservasi laut di desa memegang peran yang sangat strategis dalam memelihara kawasan laut dangkal dengan ekosistem terumbu karang yang ada di dalamnya. Penetapan DPL dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui tahapan pertemuan tingkat desa yang dihadiri oleh unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa dan masyarakat. Pertemuan dilakukan untuk membahas penetapan lokasi, luasan areal, posisi penetapan tapal batas, aturan-aturan termasuk sanksi-sanksi dalam penetapan yang akan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) mengenai DPL.

Pada umumnya perdebatan mengenai penetapan DPL berlangsung dinamis karena ide dan seluruh aturan main dirumuskan sendiri oleh masyarakat. Penetapan sanksi

merupakan bagian terpenting yang mengambil waktu tersendiri karena berhubungan dengan akses masyarakat ke sumber mata pencaharian mereka. Tidak jarang banyak warga yang kurang setuju dan melemparkan protes terhadap penetapan aturan-aturan dalam DPL. Dinamika dalam penetapan aturan DPL yang kemudian dituangkan dalam Perdes merupakan cermin dari kepedulian masyarakat untuk tetap mempertahankan eksistensi sumberdaya ikan dan non-ikan yang ada di kawasan terumbu karang mereka.

Tindak lanjut dari penetapan DPL adalah perumusan perdes yang merupakan aturan tertinggi di tingkat desa, yang mengikat seluruh komponen masyarakat desa. Dalam perdes tercantum seluruh aspek penetapan DPL sampai pada sanksi yang akan diterapkan. Jika ada oknum masyarakat yang mencoba mengambil sumberdaya pada daerah yang dilindungi akan segera dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Luasan DPL memang diharapkan minimal sekitar 10 % dari total luasan terumbu karang yang ada di desa. Namun demikian, sampai saat ini masyarakat sangat merasakan bahwa DPL merupakan “bank” ikan yang ada di sekitar desa mereka. Tidak jarang beberapa desa akhirnya menetapkan untuk memperluas DPL itu sendiri dengan harapan peningkatan jumlah ikan yang lebih banyak.

Dari kajian ekologi, DPL merupakan kawasan yang dilindungi dari segala aktivitas penangkapan ikan dan sumberdaya laut lainnya, sehingga akan memberikan rasa aman bagi ikan dan sumberdaya non-ikan untuk bersembunyi, mencari makan, berkembangbiak dan bertahan hidup. Indikator yang sangat jelas terlihat dari keberadaan DPL itu sendiri adalah semakin meningkatnya hasil tangkapan nelayan yang beroperasi di luar daerah DPL. Mereka juga merasakan semakin dekatnya sumberdaya ikan yang

ditangkap dan semakin bervariasi jenis ikan yang ada dan berkembang untuk dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat di sekitar daerah DPL. Dari survei yang dilakukan di seluruh desa binaan Coremap Kabupaten Buton, didapatkan bahwa disamping meningkatnya jumlah hasil tangkapan nelayan, juga mulai muncul beberapa jenis ikan yang menjadi indikator penutupan terumbu karang hidup. Jenis ikan ini mulai berkembang di dalam daerah DPL. Hal ini menunjukkan betapa keberadaan DPL sangat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Memang, DPL merupakan daerah yang tak dapat diambil ikan dan sumberdaya non ikannya. Namun perlu diingat, bila ikan dan sumberdaya non ikan dapat berkembang dengan baik di dalam kawasan ini maka perkembangan tersebut akan berdampak pada peningkatan sumberdaya perikanan hingga ke luar wilayah yang ditetapkan sebagai DPL.

Kegiatan penyusunan, penetapan dan penerapan DPL merupakan salah satu contoh nyata yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan peran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya terumbu karang di wilayah pesisir.

Tidak mudah memang untuk memfasilitasi pembentukan DPL ini namun jika dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, akan mengundang apresiasi dan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaannya. Gambaran riil mengenai bertambahnya jumlah ikan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat pesisir serta mulai munculnya keanekaragaman sumberdaya yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat merupakan pendorong kuat untuk menumbuhkan kesadaran yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dengan jelas di 43 desa binaan Coremap II Kabupaten Buton yang merupakan salah satu kabupaten program Coremap II Kawasan Timur Indonesia yang didanai oleh Bank Dunia.

“Bank Ikan” melalui penetapan DPL menjadi langkah strategis untuk mendorong peran masyarakat untuk menjaga sumberdaya pesisir. Semoga program ini terus bergulir ke desa-desa lainnya. (*)

*Penulis adalah staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNHALU, Focal Point dan moderator Milis Jaringan Peneliti (JiKTI), dan Ketua Tim Konsultan COREMAP II Buton. Kontak: Jl. Sultan Hasanuddin No 58 Bau Bau Kab. Buton, marufkasim@hotmail.com, www.marufkasim.blog.com, 08565655664

Dengan Motor yang Terawat, Petugas Kesehatan Selalu Siaga

Oleh Mansetus Balawan

*“Bagi seorang pekerja kesehatan, terlambat semenit
nyawa bisa jadi taruhan”*

(Maria Yasinta Lowa, seorang bidan Desa di Flores NTT)

Pintu rumah Bidan Maria Yasinta Lowa tiba-tiba digedor pada Kamis, 23 April 2009 sekitar pukul 23.30 Wita. Sambil mengusap matanya, perempuan yang akrab disapa bidan Yanti ini bangun dari tidurnya dan bergegas membuka pintu rumah. Di luar sana, seorang bapak sudah menunggu. Dengan suara terbata-bata ia meminta bidan Yanti menolong isterinya yang hendak melahirkan. Setelah mendengar pernyataan kesediaan bidan Yanti, ia pun bergegas pergi.

Mendapat panggilan darurat merupakan hal yang selalu dialami Yanti yang bekerja sebagai seorang bidan di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Terkadang panggilan darurat seperti itu datang dari 2-3 orang

secara bersamaan. “Bagi seorang pekerja kesehatan, terlambat semenit saja nyawa bisa jadi taruhan,” tukas bidan Yanti ketika menerima bantuan motor dari Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS).

Kendalanya, demikian tutur bidan asal Nagakeo NTT ini, banyak petugas kesehatan yang bekerja di desa seperti dirinya tidak memiliki kendaraan operasional. “Sulit melayani panggilan pasien dengan cepat di waktu bersamaan,” tuturnya.

Bahkan untuk kasus-kasus darurat tak jarang bisa terjadi kematian karena terlambat memberikan pertolongan. Apalagi di wilayah pedesaan sarana transportasi umum masih sangat minim.

“Syukurlah bahwa kendala yang saya hadapi selama sekitar 10 tahun bekerja sebagai bidan desa itu sudah teratasi dengan kehadiran YKS yang memberikan bantuan sepeda motor kepada saya bulan Maret 2009 lalu. Banyak kemudahan saya dapatkan dan banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan sudah tertolong dengan baik. Meski baru 3 bulan berjalan, satu masalah krusial yang terpecahkan adalah tak ada lagi kematian akibat terlambat pertolongan. Apalagi sepeda motor YKS dikelola dengan sistem khusus sehingga kendaraannya selalu siap pakai,” terang bidan Yanti.

Kisah bidan Yanti di atas adalah gambaran petugas kesehatan yang mengabdikan diri di berbagai daerah di NTT dan Indonesia pada umumnya. Setiap hari mereka menempuh perjalanan yang jauh untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah binaan mereka.

Beragam pelayanan kesehatan mereka lakoni, mulai dari kegiatan posyandu, imunisasi, menolong persalinan dan melayani panggilan pasien dengan berbagai kasus kesehatan. Karena itu, tak heran bila ada pasien yang tidak terlayani jika panggilan datang dalam waktu bersamaan. Apalagi di antara

pasien yang satu dan yang lainnya berjauhan jaraknya. Bidan Yanti menjelaskan, 6 posyandu yang masuk di wilayah kerjanya, berjarak 6 kilometer dari tempat tinggalnya.

Antara Plat Merah dan Hitam

Lain bidan Yanti, lain pula Marianus Wuring. Petugas kesehatan yang bekerja di Desa Baniona, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur ini memiliki kisah sendiri setelah bekerjasama dengan YKS dalam program Manajemen Sarana Transportasi Kerusakan Minimum Kendaraan (*Zero Breakdown*) untuk pelayanan kesehatan di pedesaan.

Marianus yang juga mendapatkan satu unit sepeda motor dari YKS untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya itu berkisah kalau sebelumnya pernah juga mendapat bantuan sepeda motor dari Dinas Kesehatan atau diistilahkan plat merah.

Tanpa bermaksud membuat perbedaan, Marianus mengaku bahwa ketika menggunakan sepeda motor plat merah dari Dinas Kesehatan, ia merasa ada kecemburuan di antara sesama petugas kesehatan. Karena itu, meski dirinya diberikan kepercayaan menggunakan motor plat merah, namun bila ada petugas kesehatan yang membutuhkan, mau tidak mau harus dipinjamkan. Namun ini bukan letak masalah sebenarnya. Yang jadi soal, ketika ada kerusakan, Marianus sendiri yang menanggung resikonya. “Berbeda dengan motor YKS yang memiliki sistem milik sendiri. Karena itu tidak ada masalah ketika motor itu dipinjamkan ke petugas lainnya untuk pelayanan kesehatan dan terjadi kerusakan,” jelas Marianus ketika memberikan testimoni dalam sebuah per-temuan evaluasi antara YKS dan petugas kesehatan pengendara sepeda motor.

Keunggulan lainnya dari Program Manajemen Sarana Transportasi (MST) dikemukakan pula Ansel Demon, petugas kesehatan yang bekerja di Puskesmas Pembantu Epubele, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Ia menilai, dengan program MST kendaraan selalu dalam keadaan siap pakai dan jarang, bahkan hampir tidak pernah terjadi kerusakan pada saat sedang melakukan pelayanan kesehatan. Hal ini karena program yang dikembangkan YKS ini dilakukan dengan teliti, di mana perawatan dilakukan secara terjadwal terhadap semua kendaraan. Hal ini membuat kondisi sepeda motor tetap awet meski sudah 7 tahun dioperasikan. Lain dengan motor plat merah yang terkadang kerusakannya dibiarkan sehingga menyebabkan kerusakan susulan yang menyedot biaya yang melewati kemampuan. Dan akhirnya kendaraan dibiarkan tidak beroperasi lagi karena ketiadaan biaya.

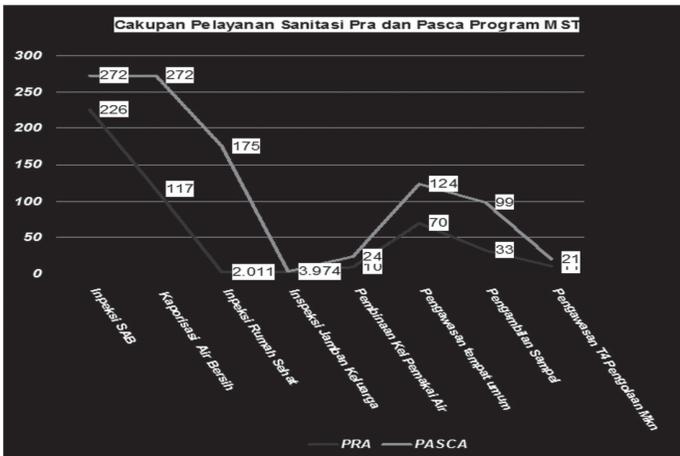
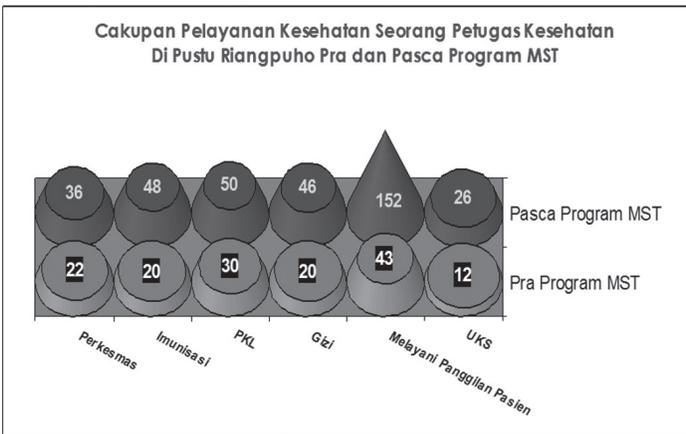
Cakupan Pelayanan Meningkat

Tidak dapat dipungkiri, sejak diimplementasikan pada Juli tahun 2002, Program MST khususnya dengan sistem kerusakan minimum (*zero breakdown*) untuk pelayanan kesehatan yang dikembangkan YKS telah memberikan manfaat, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat penerima, antara lain;

- Kemudahan masyarakat mengakses informasi dan pelayanan kesehatan
- Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
- Respon terhadap panggilan pasien lebih cepat
- Peningkatan jumlah fasilitas sanitasi yang dimonitor
- Peningkatan frekuensi layanan kesehatan bagi sekolah dasar

- Kemudahan dalam melakukan penyisiran kasus-kasus kesehatan
- Meningkatnya pelayanan kesehatan ke desa-desa terpencil.
- Peningkatan kunjungan rumah
- Peningkatan kunjungan ke posyandu

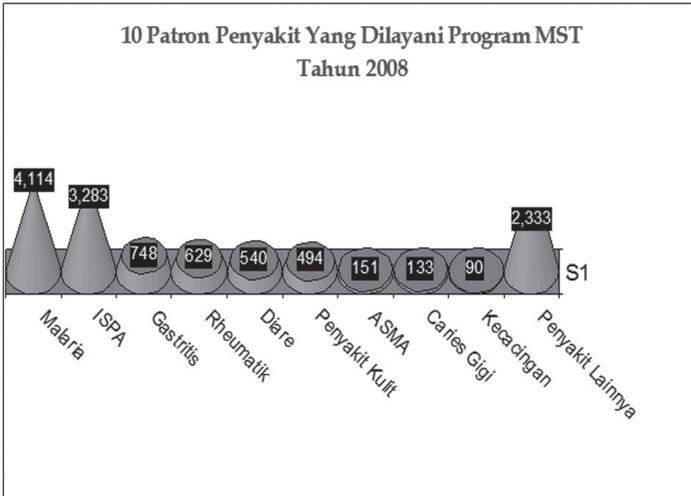
Untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan dari Program MST dapat dilihat pada diagram-diagram yang ditampilkan berikut ini:



Sumber data: logbook pengendara

Grafik di atas menunjukkan terjadinya peningkatan cakupan pelayanan yang sangat signifikan setelah petugas sanitasi mendapat bantuan motor dari YKS.

Sementara untuk melihat kasus-kasus kesehatan menonjol yang dilayani dengan sepeda motor bantuan YKS dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber data: logbook pengendara

Logbook, Alat Kontrol yang Efektif

Demi menjaga efektivitas penggunaan sepeda motor untuk pelayanan kesehatan, pada saat implementasi program, YKS melibatkan berbagai pemangku kepentingan di antaranya Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan dan berbagai LSM mitra. Mereka dilibatkan sebagai pemantau lapangan dan disertakan dalam setiap pertemuan monitoring dan evaluasi.

Fungsi pemantauan yakni melihat efektivitas penggunaan sepeda motor untuk pelayanan kesehatan dan melaporkan kepada YKS setiap pelanggaran yang dilakukan pengendara kesehatan. Dengan demikian, pengendara kesehatan yang



tidak mematuhi tata tertib pemanfaatan sepeda motor untuk pelayanan kesehatan akan diberikan peringatan. Tindakan lainnya yang dilakukan adalah menarik kembali sepeda motor bantuan dan diberikan kepada pengendara kesehatan lainnya, baik dalam wilayah yang sama atau wilayah lain, bila pengendara bersangkutan masih melakukan pelanggaran. Penarikan sepeda motor juga bisa langsung dilakukan bila terjadi pelanggaran dengan kategori berat seperti kecelakaan yang terjadi karena mabuk.

Lebih dari itu, para pengendara kesehatan juga dikontrol melalui sebuah buku yang disebut *logbook*. Artinya setiap aktivitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan sepeda motor selalu dicatat dalam buku tersebut. Isinya mencantumkan angka spidometer awal saat berangkat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan, tempat tujuan, jenis pelayanan yang dilakukan, kasus kesehatan yang ditangani, jumlah sasaran,

dan spidometer saat berada di tempat tujuan. Semuanya dibukukan secara teratur untuk memastikan bahwa penggunaan kendaraan benar-benar untuk melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu, dari *logbook* pengendara, YKS bisa mendapatkan data pelayanan kesehatan di wilayah kerja dari masing-masing pengendara kesehatan.

Bermula dari FGD

Inisiatif mengembangkan program Manajemen Sarana Transportasi (MST) khususnya dengan sistem kerusakan minimum (*zero breakdown*) untuk pelayanan kesehatan di daerah pedesaan oleh Yayasan Kesehatan untuk Semua/Health for All (YKS/HfA), bermula dari sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) tentang kondisi kesehatan ibu anak bersama petugas kesehatan dan penyuluh lapangan KB se-Kabupaten Flores Timur pada awal Juli 2000. Dalam diskusi itu terungkap bahwa banyak ibu dan bayi yang meninggal hanya karena terlambat dirujuk ke pusat-pusat pelayanan kesehatan atau karena petugas kesehatan datang terlambat. Hal ini dikarenakan ketiadaan sarana transportasi, baik transportasi umum untuk masyarakat maupun untuk petugas kesehatan. Akibatnya masih banyak orang di daerah pedesaan menderita dan bahkan meninggal karena penyakit atau kasus kesehatan yang sebetulnya bisa ditangani. Kondisi ini dapat ditemukan di hampir semua wilayah NTT.

Permasalahan ini memacu Willy Balawala untuk mencari informasi lewat email. Dalam proses pencarian informasi itu, ditemukan *Riders for Health* (RfH) UK yang telah mengembangkan program tersebut di beberapa negara di Afrika. Informasi ini kemudian dikonfirmasi kepada Simon Millward dari *Millennium Rider*. Simon adalah seorang penggemar sepeda motor yang bertemu dengan Willy di

Kupang pada bulan September 2000. Saat itu, dia dalam perjalanan keliling dunia untuk mencari dana sosial yang diperuntukkan bagi RfH UK. Dalam proses komunikasi, RfH juga memberikan dukungan dengan mensponsori Willy mengikuti pelatihan *Transport Resource Management* untuk pelayanan kesehatan dan meninjau program yang sedang diimplementasi di Herare, Zimbabwe, sebelum menyusun program di NTT. Dari Herare, Willy kemudian magang untuk keterampilan administrasi di kantor Pusat RfH Inggris. Kegiatan ini ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi program dan penggalangan dana.

Sekembalinya Willy dari mengikuti pelatihan di Herare, Zimbabwe dan kantor pusat RfH Inggris, pada bulan November 2002, ia secara intens berdiskusi dengan sejumlah tokoh. Mereka antara lain, Prof. Dr. Maria Patty Noach (Dosen Undana), Tony Kleden (Wartawan HU Pos Kupang) dan Leonard Simonjuntak (Direktur Yayasan Pikul-saat itu). Diskusi itu kemudian menyepakati pembentukan sebuah yayasan sebagai wadah untuk merealisasikan program dimaksud. Yayasan itu secara resmi berdiri pada tanggal 4 April 2001 dengan nama Yayasan Kesehatan untuk Semua/*Health for All* (YKS/HfA).

Setelah YKS/HfA dibentuk, Willy kemudian melakukan penilaian di Kabupaten Flores Timur dan Lembata untuk menjajaki lokasi operasional program serta lembaga-lembaga yang bisa menjadi mitra kerja. Pilihan jatuh pada daerah Flores Timur. Sementara itu dari hasil penilaian, ditemukan bahwa Dinas Kesehatan, terutama puskesmas-puskesmas telah hadir dan melakukan intervensi yang intensif berkaitan dengan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan dibandingkan dengan intervensi LSM-LSM. Dengan demikian dipilihlah Dinas Kesehatan sebagai mitra kerja YKS/HfA.

Pada tahap awal, YKS bekerja di 5 kecamatan di Flores Timur yakni, Kecamatan Lewolema, Solor Barat, Tanjung Bunga, Adonara Tengah dan Wotan Ulumado.

Dari *Millennium Rider* ke *Motorcycle Outreach*

Tujuh tahun sudah YKS berkiprah di Flores Timur meretas isolasi masyarakat dari akses akan informasi dan pelayanan kesehatan. Semua itu tidak terlepas dari dukungan Simon Millward dari *Millennium Rider*. Dia seorang penggemar sepeda motor yang mengabdikan diri sepenuhnya dalam usaha-usaha penggalangan dana sosial untuk pengembangan program. Dana yang didapat Simon, selain diperuntukan bagi *Riders for Health* Inggris juga diperuntukan bagi YKS.

Bila LSM pada umumnya memiliki lembaga donor, maka tidak demikian bagi YKS. Karena itu, untuk eksisnya program di lapangan, YKS bekerjasama dengan individu dan berbagai organisasi penggemar sepeda motor dunia, di antaranya; FEMA, AMA, RfH, Yamaha Japan, ABATE of Indiana, ABATE of Alaska, South Suburban Chapter of Illinois, In Memory of Captain Ride dan lain-lain.

Pada tahun 2006, kerjasama dengan Simon Millward dari *Millennium Rider* berakhir akibat sebuah kecelakaan yang terjadi antara Mali dan Senegal di Afrika Barat. Kecelakaan naas itu akhirnya merenggut nyawa Simon yang saat itu sedang dalam perjalanan mencari dana sosial.

Karena itu, untuk kelanjutan program, dibentuklah sebuah lembaga untuk mendukung program YKS ke depan yang diberi nama *Motorcycle Outreach (MOR)* yang bermarkas di Inggris. Ide pembentukan lembaga ini mengemuka dalam sebuah pertemuan resmi di Inggris pada awal tahun 2006 yang diprakarsai Willy Balawala yang saat itu menjabat sebagai Direktur YKS, bersama Craig Carey-Clinch, David French,

Barbara, Frank Surgener, Paul Milward, Ian Mutch, Mark Milward, Bob Tomlins, Jane Milward, Robert Rasor, Christina Gesios, Kate dan Barbara Alam. selain itu YKS tetap bekerjasama dengan individu dan berbagai organisasi penggemar sepeda motor di dunia.

Saat ini YKS juga sedang berupaya menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Flores Timur untuk memulai pendanaan program bersama. Sedangkan untuk pencarian dana lokal, bengkel YKS tidak hanya melayani servis sepeda motor YKS, tapi juga dijadikan tempat penjualan suku cadang dan servis bagi umum.

Sejarah MST

Ketika *Riders for Health* mulai memperkenalkan *MST Zero Breakdown* pada awal tahun 90-an, banyak kritik dan keraguan menentang ide ini dengan mengatakan ini adalah ide keliru bila dimaksudkan untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui penyediaan transportasi bagi masyarakat Afrika. Namun ketika program ini diimplementasikan, ternyata berhasil meningkatkan kondisi kesehatan 300-400%.

Program MST Kerusakan Minimum pertama dimulai di Lesotho, Afrika bagian selatan pada tahun 1991. Sebanyak 47 sepeda motor dapat digunakan lebih dari 7 tahun tanpa kerusakan parah. Teknik pendekatan yang sama diterapkan di Zimbabwe dan Ghana. Pada tahun 1999 *Riders for Health* memulai sistem MST di Nigeria dan berjalan sesuai rencana meskipun wilayahnya luas dan sering menghadapi kondisi kekacauan sosial dan politik.

Pada tahun 2002, program MST mulai dikembangkan di Flores Timur, NTT oleh Yayasan YKS dan merupakan program pertama yang diimplementasikan di Asia. Program berjalan sukses hingga sekarang.

Saat ini program yang sama telah pula dikembangkan di Argentina oleh seorang dokter ahli beda tulang, Gerardo Sola, setelah mengikti magang di YKS pada tahun 2006 lalu. Sekembalinya ke Argentina ia mendirikan sebuah lembaga yang ia namakan *Pilotos Solidarios* untuk menjalankan program yang sama. (*)

*Penulis adalah Direktur Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS).
Kontak: Jl. Ade Irma II Lor. 1 No. 30 (Depan Platina Komputer) Walikota,
Flores, 0383-21641/HP. 081339306242, email: yks_flores@telkom.net

Belajar Membaca dan Menulis di Sekolah *Lipu*

Oleh Edy Wicaksono

Udara terasa dingin, kabut pun masih menyelimuti alam, kicau burung di pepohonan menambah semarak suasana, sekelompok anak-anak tampak sedang duduk melingkar di atas bebatuan di tepi sungai. Mereka bukan sedang bermain tapi belajar. Hal ini terdengar jelas dari suara-suara mereka yang nyaring mengeja huruf demi huruf. Sekolah mereka memang tak memiliki gedung khusus layaknya sekolah pada umumnya. Sekolah mereka adalah sekolah alam. Sebuah model pendidikan alternatif yang didirikan Yayasan Merah Putih bersama Tau Taa Wana yang tidak tersentuh layanan sekolah formal.

Tau Taa Wana adalah salah satu komunitas adat di Sulawesi Tengah. Wilayah hunian dan aktivitas mereka secara geografis berada di kawasan pedalaman, di tengah hutan tropis dengan rata-rata ketinggian di atas 800 meter dari permukaan laut

atau lebih tepatnya berada di pegunungan Balingara dan meliputi Kabupaten Tojo Una-una, Banggai dan Morowali. Kawasan ini dapat ditempuh selama 18 jam perjalanan dari kota Palu, Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk memasuki kampung mereka atau dalam bahasa setempat disebut *lipu*, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki naik turun bukit dan sesekali menyeberangi sungai selama 6-10 jam.

Di Tahun 2008, jumlah komunitas Tau Taa Wana mencapai 2000-an jiwa, mereka tersebar di beberapa unit pemukiman. Karena letaknya yang berada jauh di pedalaman dan tidak memiliki akses transportasi, maka di wilayah ini tidak ada sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Akibatnya, buta aksara merupakan problem utama. Tak heran mereka seringkali menjadi korban pembodohan dari pihak lain, utamanya saat menjual hasil-hasil hutan mereka berupa damar, rotan dan madu ke kota atau kampung sekitarnya. “Karena tak bisa membaca dan berhitung, kami seringkali dibodohi orang luar, apalagi saat menjual rotan dan damar” ujar Apa Wis, Tetua Adat Lipu Ueviau.

Sekolah Dasar hanya ada di desa-desa transimgrasi, yang jaraknya dari kampung terdekat harus dicapai dengan berjalan kaki selama 6-10 jam. Beberapa di antara komunitas ini pernah berupaya mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut, namun perlakuan diskriminatif dan penghinaan membuat mereka mengurungkan niat, selain karena faktor keterbatasan ekonomi.

Tetapi, ketiadaan fasilitas pendidikan dari pemerintah tak membuat mereka putus asa. Bertepatan dengan masuknya Yayasan Merah Putih Palu yang saat itu melakukan penelitian dan pemetaan kawasan hutan, mereka akhirnya sepakat dan bersama-sama membangun sekolah alternatif. Sekolah itu kemudian diberi nama Sekolah Lipu atau sekolah kampung.

Kini, Sekolah Lipu itu telah berkembang di empat kampung, yaitu di Ueviau, Lengkasa, Sabado dan di Kablenga. Jumlah muridnya sekarang sudah lebih 100 orang. Meski pada awalnya sekolah ini dimaksudkan untuk memenuhi hasrat belajar anak-anak yang tak terpenuhi di sekolah formal, namun orang-orang dewasa bahkan para tetua kampung menginginkan agar kepada mereka diberikan sesi khusus untuk belajar baca tulis pada malam hari se usai bekerja di kebun atau hutan. Kini sebagian besar orang dewasa dan orang tua juga sudah mahir baca tulis dan hitung.

Konsep Sekolah Lipu di Wana Bulang adalah sekolah alam. Metode belajarnya sangat informal. Hubungan guru dan murid berlangsung sangat akrab. Maka jangan heran, di Sekolah Lipu, canda, tawa, wajah serius bercampur baur menjadi satu dan silih berganti.

Sensi (16) yang dipercayakan menjadi guru di Lipu Ueviau mengatakan, “Di sini, hubungan kami bukan sekedar guru dan murid, tapi juga sebagai teman bahkan saudara, semua dilandaskan pada kasih sayang pada sesama.”

Di awal pendiriannya proses belajar mengajar di Sekolah Lipu difasilitasi oleh para relawan dari Yayasan Merah Putih. Namun kini anggota komunitas yang sudah mahir baca tulis dan hitung serta memiliki pengetahuan lebih, juga menjadi guru. Pada prinsipnya, semua orang bisa menjadi guru di sekolah lipu. Contohnya, Jiro, seorang pemuda yang mengajarkan cara membuat anyaman dari rotan kepada anak-anak atau Indo Ninjang, sang tabib kampung yang mengajarkan khasiat tumbuhan obat dan cara meramunya.

Meski dengan bekal fasilitas seadanya, proses belajar tetap berlangsung dengan baik. Terkadang bila kehabisan kapur, mereka terpaksa menulis dengan arang atau batu di atas tanah. Sesekali bila tak ada lagi kertas yang tersedia, mereka meng-

gunakan daun untuk menulis. Indo Gebi, guru sekolah lipu di Lengkaesa mengajarkan pada anak-anak agar tak pernah menyerah pada keadaan.

Tak ada gedung khusus untuk belajar, karenanya proses belajar bisa berlangsung di mana saja. Di atas bebatuan, di tepi sungai, di bawah pohon, di tepi kampung atau bahkan di tengah-tengah kebun. “Sekolah ini bisa hadir karena keinginan kuat kami untuk bisa maju, semangat untuk tidak menyerah pada keadaan harus terus menerus dijaga” ujar Indo Gebi.

Materi utama adalah pelajaran baca, tulis dan hitung, ditambah pengetahuan umum dan lingkungan serta tradisi dan kearifan lokal leluhur mereka. Sekolah lipu selain menjadi tempat belajar baca, tulis dan hitung, juga menjadi media transformasi tradisi dan kearifan leluhur kepada generasi mudanya.

Untuk menjaga keberlanjutan sekolah lipu, komunitas Tau Taa Wana Bulang sepakat untuk menggaji para guru, bukan dengan uang seperti layaknya guru di kota, namun dengan cara menyerahkan sebagian hasil panen mereka. Hasil panen tersebut dikumpulkan, sebagian diberikan kepada guru dan selebihnya lagi untuk digunakan membeli kebutuhan sekolah lainnya seperti kapur, buku dan lain-lain.

“Dengan cara seperti ini, para guru yang mengajar di sekolah tak perlu lagi pusing memikirkan kebunnya karena sudah dikerjakan secara bergotong royong oleh warga dan ada hasil panen dari warga, sehingga Sekolah Lipu bisa tetap jalan dan anak kami tetap bisa belajar,” kata Apa Wis.

Guna mendukung aktivitas belajar sekolah lipu, secara swadaya komunitas Tau Taa Wana juga membangun Perpustakaan Lipu dan saat ini sudah ada di tiga desa, yakni di Lengkaesa, Sabado dan Ueviau. Buku koleksi perpustakaan yang kini berjumlah 400-an bersumber dari hasil swadaya

komunitas dan sumbangan pihak-pihak yang peduli pada pendidikan.

Warga bangga dengan kehadiran Sekolah Lipu. Meski fasilitasnya terbatas tapi di sekolah ini anak-anak mereka masih bisa membaca, menulis dan menghitung. “Meski pemerintah tak membangun sekolah untuk kami, tapi kami bisa membangunnya sendiri. Sekarang kami sudah bisa membaca, menulis dan berhitung,” ujar Apa Ntoi, salah satu tetua lipu.

Badri Djawara, aktivis Yayasan Merah Putih berharap agar pemerintah memperhatikan hak warga di daerah terpencil ini atas pendidikan yang lebih baik, termasuk membangun sekolah dan mengirimkan guru yang layak serta fasilitas pendukung lainnya.

* Penulis adalah Edy Wicaksono adalah staf Yayasan Merah Putih, Palu. Kontak: Jl. Tadulako II No 11, Kelurahan Palupi, Sulawesi Tengah, email: ymp_paluu@yahoo.com, 0451-487137

Media Lokal Se-KTI

Gorontalo

Gorontalo Post

Jln. Nani Wartabone 71-A (Eks. Jalan Andalas), Kota Gorontalo

(0435) 827551 - 827552/ (0435) 829603

Email: redaksi_gp@yahoo.com

Maluku

Suara Maluku

Jl. Diponegoro 71 Ambon, Maluku

(0911) 356550/349571

Maluku Utara

Malut Pos

Jl Mess AL (Belakang Polres) Kel. Takoma, Ternate, Maluku Utara

(0921) 327055

Nusa Tenggara Barat

Lombok Pos

Jl. TGH Faisal No. 33 Cakranegara, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat

(0370) 673500 / (0370) 673600

Nusa Tenggara Timur

Timor Ekspres

Jl. R.A. Kartini No. 1 A Kel. Kelapa Lima Kupang 8500

(0380) 821396 / (0380) 820242

Email: timeks_jpnn@yahoo.co.id

Papua

Cendrawasih Pos
Jl. Cendrawasih Entrop Kelapa Dua Jayapura
(0967) 532417 / (0967) 532418 / 536544

Papua Barat

Harian Cahaya Papua
Jl. Pertanian Wosi Dalam Manokwari, Papua Barat
(0986) 213743
cahaya_papua@yahoo.com

Sulawesi Barat

Radar Sulbar
Jl. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju, Sulawesi Barat
(0426) 22138

Sulawesi Selatan

Harian Tribun Timur
Jl. Cenderawasih, Makassar, Sulawesi Selatan
0411 8115555 / 0411 8115522

Sulawesi Tengah

Radar Sulteng
Jl. Yos Sudarso 9, Palu, 94118
(0451) 454306 / 456111

Sulawesi Tenggara

Kendari Pos
Jl. Malik Raya No. 50 Kendari, Sulawesi Tenggara
(0401) 326512 / 3126513

Sulawesi Utara

Manado Pos
Jl. Babe Palar No. 54 Manado
(0431) 855558 / (0431) 855559 / 0431) 857132

Media Nasional

Seputar Indonesia

Menara Kebon Sirih Lt. 22
Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19
Jakarta 10340
Telp. (021) 3926955 Faks. (021) 3927721
redaksi@seputar-indonesia.com

Kompas

Jl. Palmerah Selatan No. 26-28
Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5347710, 5347720, 5347730, 5302200 Fax. (021) 5486085
kompas@kompas.com

Koran Tempo

Kebayoran Center
Blok A11-A15, Mayestik
Jakarta Selatan 12440
Telp. (021) 7255625 Faks. (021) 7255645
koran@tempo.co.id

Media Indonesia

Kompleks Delta Kedoya
Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Telp. (021) 5812088 Faks. (021) 5812105
redaksi@mediaindonesia.co.id

Republika

Jl. Warung Buncit Raya No. 37
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7803747 Faks. (021) 7983623
sekredrep@hotmail.com

Suara Pembaruan

Jl. Dewi Sartika No. 136D
Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 8014077 Faks. (021) 8007262, 8016131
koransp@suarapembaruan.com

Tempo

Gedung Tempo Jl. Proklamasi No. 72
Jakarta
Telp. (021) 3916160 Faks. (021) 3921947
red@tempo.co.id

The Jakarta Post

Jl. Palmerah Selatan No. 15
Jakarta
Telp. (021) 5300476, 5300478, 5306970 Faks. (021) 5306971, 5350050
jktpost2@cbn.net.id; editorial@thejakartapost.com

SCTV

Surya Citra Televisi
Wisma IWI Lt 8 Jl. Perjuangan (jalur lambat Tomang tol)
Kebun Jeruk Jakarta 11530
Telp. (021) 533 0255 Faks. (021) 533 0284

ANTARA

Wisma ANTARA Lt 19-20, Jl Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
Telp. (021) 3459173, 3802383, 3812043, 3814268.
Faks. (021) 3840907, 3865577
Email : redaksi@antara.co.id, letter@antara.co.id,
newsroom@antara.co.id

RCTI

(PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, Media Nusantara Citra Group – MNC)
Jalan Raya Perjuangan No. 3 Kebun Jeruk
Jakarta 11000
Telp. (021) 5303540 Faks. (021)5493852

Global TV

(TVG, PT Global Informasi Bermutu, Media Nusantara Citra Group – MNC)
Wisma Indovision Lantai 17
Jalan Raya Panjang Z/III Green Garden
Jakarta 11520
Telp. (021) 5828555 Faks. (021) 5823636
Includes programmes of MTV Indonesia.

Indosiar (Indosiar Visual Mandiri)

Jalan Damai No. 11
Daan Mogot
Jakarta 11510
Telp. (021) 5672222 Faks. (021) 5652221

Metro TV

Metro TV (PT Media Televisi Indonesia)
Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D
Kedoya, Kebon Jeruk
Jakarta 11520
Telp. (021) 5830 0077 Faks. (021) 581 6365, 581 0044

TPI

Televisi Pendidikan Indonesia
Jl. Pintu II TMII, Pondok Gede Jakarta 13810
Telp. (021) 841 1544 Faks. (021) 841 1544

Stasiun Televisi Swasta INDOSIAR

Jl Damai No. 11 Daan Mogot Jakarta 11510
Wisma indocement 01/F1 Jl Jend. Sudirman Jakarta 12910
Telp. (021)5640567, 5655753
Fax. (021) 5223977

DETIK.COM

Aldevco Octagon Building – Lantai 2
Jl. Warung Buncit Raya No.75, Jakarta Selatan 12740
Telp. (021) 794.1177 Faks. (021) 794.4472
Email : redaksi@staff.detik.com

ANtv (ANteve)

ANtv (ANtv / PT Cakrawala Andalas Televisi)
Mulia Center Building 19th Floor
Jalan HR Rasuna Said Kav. X-6 No. 8
Jakarta 12940
Telp. (021) 5222084-86 Faks. (021) 5222087

Trans TV

Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia)
Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telp. (021) 794 4240 – 799 0572
Fax. (021) 799 2600

tvOne

(formerly Lativi) (PT Lativi Media Karya)
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Rawa Teratai II No. 2
Jakarta Timur 13260
Telp. (021) 461 3545/461 5044 Faks. (021) 461 6255

